KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Proposal Trump Ancaman Bagi Palestina Merdeka
Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

BKSAP DPR Minta Negara Muslim Bersatu

Proposal Trump Ancaman Bagi Palestina Merdeka

KETUA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon melihat proposal yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang rencana perdamaian Timur Tengah tak bisa disebut sebagai proposal perdamaian. Menurutnya, proposal tersebut merupakan "perampokan sistematis", karena Trump berupaya mengamankan kepentingan politik Israel di atas tanah Palestina dengan dalih menawarkan solusi komprehensif.

"Di tengah upaya keras masyarakat internasional meredakan situasi di Timur Tengah, kehadiran proposal 'Deal of the Century' Trump merupakan ancaman serius bagi proses perdamaian yang telah diupayakan selama puluhan tahun. Soliditas parlemen negara-negara muslim sangat diperlukan untuk memprotes kebijakan itu. Perdamaian di Timur Tengah tak bisa tercapai melalui kebijakan unilateral," tegas Fadli dalam The 3rd Conference of the League of Parliamentarians for Al-Quds di Malaysia, kemarin.

Lebih lanjut, Fadli menguraikan, proposal Trump merupakan kebijakan provokatif. Selain hanya mengamankan kepentingan politik Israel, proposal tersebut banyak melanggar resolusi PBB, Madrid principles, dan Quartet Road Map. Karena itu, dirinya lebih melihat proposal tersebut sebagai rencana pengkhianatan, perampokan, dan tindakan ilegal, ketimbang mencari solusi yang adil bagi Timur Tengah, khususnya Palestina.

"Misalnya, penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selain hanya menguntungkan *Israel*, *hal itu juga* melanggar resolusi 303 UN General Assembly tahun 1949, yang menetapkan Yerusalem sebagai corpus separatum. Dengan status tersebut (corpus separatum), Yerusalem berdasarkan hukum internasional ditempatkan sebagai wilayah terpisah yang berada di bawah pengawasan internasional. Karenanya, klaim sepihak atas Yerusalem adalah tindakan melawan hukum internasional," jelas dia.

Selain melanggar resolusi 303 UN General Assembly tahun 1949, sambung dia, penetapan tersebut juga melanggar Resolusi 476 DK PBB tahun 1980. Resolusi tersebut dengan tegas memerintahkan kepada seluruh negara untuk memindahkan kantor kedutaannya dari Yerusalem, termasuk AS. Itu sebabnya, seluruh kedutaan besar negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel saat ini ada di Tel Aviv, bukan di Yerusalem.

"Tak cukup dengan Yerusalem, melalui proposal tersebut, Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas permukiman di Tepi Barat. Bahkan, Israel diberikan hak istimewa untuk mempertahankan semua pemukiman Israel di Tepi Barat seluas mungkin. Padahal, status permukiman tersebut, saat ini dianggap ilegal oleh sebagian besar komunitas internasional," sesal dia.

Di luar hak atas lahan, lanjut Fadli, proposal Trump juga tak akan mengakui Palestina sebagai negara independen secara langsung. Pengakuan atas Palestina, baru akan diberikan dalam empat tahun ke depan, itu pun ketika Palestina dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan. Mulai dari komitmen penegakan HAM hingga berhenti mendanai kelompok yang dituding AS sebagai teroris seperti Hamas.

"Dengan struktur kebijakan demikian, tak heran jika masyarakat internasional memprotes semua rencana Trump yang tertuang dalam proposalnya. Indonesia berharap, Parliamentarians for Al-Quds dapat menjadi platform bersama yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Peran parlementer yang strategis bisa menjadi kekuatan pendorong bagi terwujudnya hak-hak masyarakat Palestina sesuai ketentuan hukum internasional," jelas dia.

Fadli menegaskan, Indonesia memiliki komitmen besar untuk menghadirkan kemerdekaan Palestina. Sejumlah upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, parlemen, dan masyarakat telah dilakukan, di antaranya peresmian Rumah Sakit Indonesia di Gaza. ■ ONI